

Pendampingan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa

Capacity Building for Village-Owned Enterprises as an Effort to Improve Community Welfare

Handrianus Vianey Melin Wula^{1*}, Elpius Kalemang², Fransiskus Atok³, Fetronele Rambu Bobu⁴

¹⁻³Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Indonesia

⁴Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Timor, Indonesia

*Penulis korespondensi: handrywula@unimor.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 20 Juni 2026;

Revisi: 22 Juli 2026;

Diterima: 25 Agustus 2026;

Terbit: 31 Agustus 2026

Keywords: BUMDes; Community Empowerment; Mentoring; Participatory Action Research; Village Economy.

Abstract. *This community engagement activity aimed to strengthen the capacity of Village-Owned Enterprise (BUMDes) managers in Sone Village, Insana Tengah District, who had previously faced challenges in business management, financial administration, and community involvement. The activity employed a Participatory Action Research (PAR) approach, involving BUMDes managers and community members actively in identifying problems, formulating solutions, participating in training, and evaluating the outcomes. The assistance covered village business management, business plan development, basic bookkeeping, and strategies for marketing local products. The results showed improvements in the managers' skills and confidence in managing BUMDes. Following the assistance, the previously inactive BUMDes resumed operations by developing several business units, including ikat weaving, a basic-goods store, and party equipment rental services. The Sone Village Government also provided support through a capital contribution of IDR 120 million. The activity demonstrates that strengthening managerial capacity, promoting good governance, securing village government support, and encouraging community involvement are important factors in revitalizing BUMDes and promoting improvements in the local village economy.*

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sone, Kecamatan Insana Tengah, yang sebelumnya mengalami hambatan dalam pengelolaan usaha, administrasi keuangan, dan keterlibatan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan pengurus BUMDes dan masyarakat sebagai bagian aktif dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, mengikuti pelatihan, dan mengevaluasi hasil kegiatan. Pendampingan mencakup manajemen usaha desa, penyusunan rencana bisnis, pembukuan sederhana, dan strategi pemasaran produk lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri pengurus dalam mengelola BUMDes. Setelah pendampingan, BUMDes yang sebelumnya tidak aktif kembali beroperasi melalui pengembangan beberapa unit usaha, seperti tenun ikat, toko sembako, dan jasa penyewaan peralatan pesta. Pemerintah Desa Sone juga memberikan dukungan melalui penyertaan modal sebesar Rp120 juta. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengelola, tata kelola yang baik, dukungan pemerintah desa, dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam menghidupkan kembali BUMDes dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Kata Kunci: BUMDes; Pendampingan; Pemberdayaan Masyarakat; *Participatory Action Research*; Ekonomi Desa.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan kemampuan desa dalam mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan Masyarakat (Mayora Mayora et al. 2024). Dalam konteks tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola potensi dan sumber daya ekonomi desa secara lebih terarah. BUMDes diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan kegiatan usaha, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, dan sekaligus memperkuat kemandirian desa (Azhari et al. 2023). Keberadaan BUMDes juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola kepentingannya berdasarkan potensi serta kebutuhan Masyarakat (Hastutik, Padmaningrum, and Wibowo 2021).

Pada kenyataannya, keberadaan BUMDes belum selalu diikuti dengan kemampuan pengelolaan yang memadai. Berbagai persoalan masih ditemukan, terutama berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan usaha, administrasi dan pembukuan keuangan, pemasaran, serta keterlibatan Masyarakat (K. Bidin et al. 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan BUMDes secara kelembagaan belum cukup untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha. BUMDes membutuhkan pengelola yang memiliki kemampuan manajerial, dukungan pemerintah desa, serta masyarakat yang memahami dan merasa memiliki terhadap keberadaan usaha desa (Rahmaini, n.d. 2025).

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Sone, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan hasil observasi, BUMDes di Desa Sone belum mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung perekonomian desa dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan desa. Pengelola masih menghadapi keterbatasan dalam manajemen usaha, administrasi keuangan, dan perencanaan bisnis. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai fungsi, manfaat, dan mekanisme pengelolaan BUMDes masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan gagasan, mendukung kegiatan usaha, maupun terlibat dalam pengembangan ekonomi desa.

Masyarakat Desa Sone sebagian besar bekerja sebagai petani, sementara sebagian lainnya menjalankan kegiatan perdagangan. Kondisi ini sebenarnya memberikan peluang bagi BUMDes untuk mengembangkan usaha berdasarkan potensi ekonomi yang telah dimiliki masyarakat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha desa yang produktif. Di sisi lain, terdapat pandangan yang beragam mengenai keberadaan BUMDes. Sebagian masyarakat belum melihat manfaat BUMDes secara langsung bagi kehidupan mereka sehingga dukungan dan keterlibatan dalam pengembangan usaha masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan utama yang dihadapi BUMDes Desa Sone meliputi keterbatasan kapasitas pengelola dalam manajemen dan pengelolaan keuangan, belum optimalnya administrasi dan pembukuan, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat BUMDes, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Permasalahan tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor yang menyebabkan BUMDes belum dapat menjalankan perannya sebagai salah satu penggerak ekonomi desa secara optimal.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan pendampingan yang tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengelola dan masyarakat untuk belajar melalui praktik serta terlibat dalam proses pengembangan BUMDes (Ginting, Ginting, and Afifah 2024). Oleh karena itu, tim Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan “Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sone, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara.” Pendampingan diarahkan pada peningkatan kapasitas pengelola melalui pelatihan manajemen usaha desa, penyusunan rencana bisnis, administrasi dan pembukuan keuangan sederhana, serta pengembangan strategi pemasaran produk lokal. Selain itu, masyarakat diberikan ruang untuk memahami fungsi dan manfaat BUMDes serta didorong untuk terlibat dalam pengembangan kegiatan ekonomi desa.

Pendampingan juga dilakukan melalui penyusunan business plan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama pengurus BUMDes. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan arah yang lebih jelas dalam pengelolaan dan pengembangan usaha. Berdasarkan hasil kegiatan, struktur dan unit usaha BUMDes berhasil dibentuk kembali, sementara dokumen business plan dan SOP juga berhasil disusun bersama pengurus. Pemerintah Desa Sone turut menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan BUMDes melalui penyertaan modal sebesar Rp120 juta yang bersumber dari Dana Desa.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya diarahkan untuk menghidupkan kembali aktivitas BUMDes, tetapi juga membangun kemampuan pengelola dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha desa. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola usaha, dukungan pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan BUMDes yang mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan (Ahmad Syaickhu and Purwanto Purwanto 2025). Pengalaman Desa Sone diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi desa lain dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi desa yang berangkat dari potensi lokal dan kebutuhan nyata masyarakat.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sone, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan melibatkan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah desa, dan masyarakat. Kegiatan berlangsung selama enam bulan. Proses pendampingan disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ditemukan di lapangan, sehingga kegiatan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan ruang kepada mitra untuk terlibat langsung dalam mencari dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) (Afandi et al. 2024). Pendekatan ini dipilih karena persoalan BUMDes tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemberian pelatihan dari tim pengabdian. Pengurus dan masyarakat perlu dilibatkan sejak awal agar mereka dapat mengenali persoalan yang dihadapi, menyampaikan pengalaman, menentukan kebutuhan, mencoba solusi, dan melihat sendiri perubahan yang terjadi. Dengan cara tersebut, proses pendampingan diharapkan lebih sesuai dengan kondisi nyata di Desa Sone dan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan BUMDes.

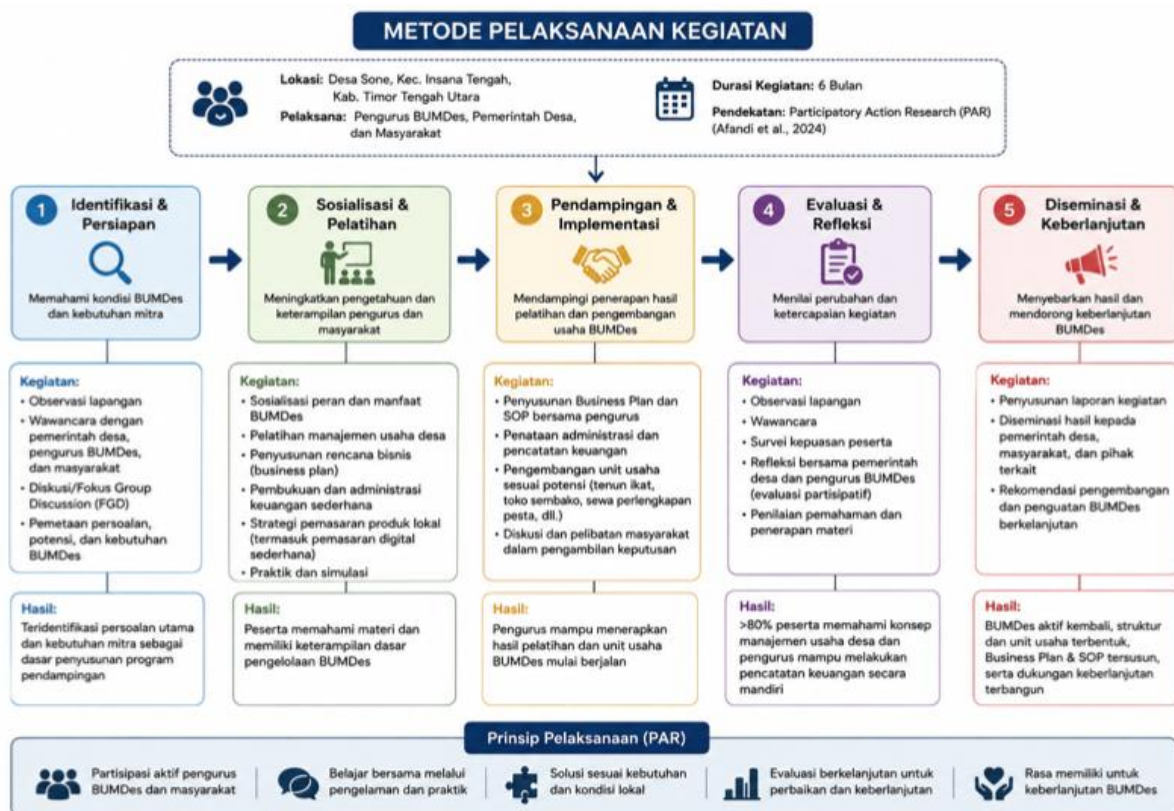
Kegiatan diawali dengan observasi, wawancara, dan diskusi bersama pemerintah desa serta pengurus BUMDes. Tahap awal ini dilakukan untuk memahami kondisi BUMDes secara langsung, termasuk persoalan yang berkaitan dengan kemampuan pengelola, administrasi dan keuangan, perencanaan usaha, potensi ekonomi desa, serta keterlibatan masyarakat. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan materi dan bentuk pendampingan yang diberikan.

Setelah persoalan dan kebutuhan mitra dipetakan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan. Materi yang diberikan meliputi manajemen usaha desa, penyusunan rencana bisnis, pembukuan dan administrasi keuangan sederhana, serta pemasaran produk lokal. Penyampaian materi dilakukan melalui diskusi dan praktik sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mencoba menerapkannya pada kegiatan BUMDes yang mereka kelola.

Tahap berikutnya adalah pendampingan secara langsung. Tim bersama pengurus BUMDes menyusun business plan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sekaligus melakukan penataan administrasi dan pencatatan keuangan. Pendampingan juga diarahkan pada pengembangan unit usaha yang sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat Desa Sone. Pada proses ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan ikut terlibat dalam pembahasan mengenai arah pengembangan BUMDes.

Untuk mengetahui perubahan yang terjadi, evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, survei kepuasan peserta, dan refleksi bersama pemerintah desa serta pengurus BUMDes. Evaluasi tidak hanya melihat apakah pelatihan telah terlaksana, tetapi juga memperhatikan sejauh mana peserta memahami materi dan mampu menerapkannya dalam pengelolaan BUMDes. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta memahami konsep manajemen usaha desa dan pengurus BUMDes telah mampu melakukan pencatatan keuangan secara mandiri.

Keberhasilan kegiatan selanjutnya dilihat dari perubahan pada kondisi BUMDes setelah pendampingan. BUMDes yang sebelumnya tidak aktif kembali berjalan, struktur dan unit usaha terbentuk kembali, serta business plan dan SOP berhasil disusun bersama pengurus. Dengan demikian, metode pendampingan dalam kegiatan ini menempatkan proses belajar, praktik, dan keterlibatan mitra sebagai bagian penting untuk membangun kemampuan pengelola sekaligus mendorong keberlanjutan BUMDes di Desa Sone.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam empat tahap utama sebagai berikut:

Tahap Persiapan dan Identifikasi Masalah

Kegiatan awal difokuskan pada pengumpulan data dan analisis kondisi BUMDes di lapangan, melalui: Observasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi dan kendala yang dihadapi BUMDes; Wawancara dan diskusi awal dengan perangkat desa dan masyarakat; *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali aspirasi dan menyepakati arah pengembangan BUMDes.

Output tahap ini_: Dokumen pemetaan permasalahan BUMDes dan potensi usaha desa yang dapat dikembangkan.



Gambar 1. Kegiatan Survey dan Diskusi.

Tahap Sosialisasi dan Pelatihan Kapasitas

Pada tahap ini, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola dan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang mencakup: Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes (perencanaan, keuangan, dan pemasaran); Pelatihan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sederhana; Sosialisasi tentang tata kelola dan transparansi BUMDes; Workshop penyusunan Rencana Bisnis (*Business Plan*) dan *SOP* BUMDes.

Output tahap ini: Pengurus dan masyarakat memahami konsep dan fungsi BUMDes; Draft dokumen *Business Plan* dan *SOP* BUMDes tersusun.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan.

Tahap Pendampingan dan Implementasi

Kegiatan ini bertujuan memastikan hasil pelatihan dapat diterapkan dalam praktik pengelolaan BUMDes. Pendampingan dilakukan melalui: Asistensi penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas pengurus; Pendampingan pencatatan keuangan dan pembukuan usaha; Pembimbingan pemasaran produk lokal (tenun, sembako); Pengenalan penggunaan media sosial untuk promosi produk BUMDes.

Output tahap ini: BUMDes aktif kembali dan mulai menjalankan unit usaha produktif dengan sistem administrasi dan keuangan yang tertib.



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan dan Implementasi.

Tahap Evaluasi dan Diseminasi

Tahap akhir kegiatan mencakup: Evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui wawancara, observasi, dan umpan balik dari peserta; Penyusunan laporan hasil kegiatan dan rencana keberlanjutan program.

Metode Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk menilai efektivitas dan dampak kegiatan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelolaan BUMDes. Metode evaluasi meliputi: Pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan pengetahuan peserta pelatihan; Observasi langsung terhadap aktivitas BUMDes setelah pendampingan; Wawancara dan survei kepuasan peserta; Analisis keberlanjutan program, meliputi kesiapan pengurus dan dukungan pemerintah desa.

Indikator Keberhasilan

Tabel 1. Indikator Keberhasilan.

No	Indikator	Target Capaian
1	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan	≥ 80% peserta aktif mengikuti pelatihan dan pendampingan
2	Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes	≥ 70% peserta menunjukkan peningkatan kemampuan manajerial
3	Penyusunan dokumen kelembagaan BUMDes	Tersusunnya SOP, Business Plan, dan laporan keuangan awal
4	Keberlanjutan kegiatan BUMDes	BUMDes mulai mengelola kembali minimal 1 unit usaha aktif

4. DISKUSI

Pelaksanaan pendampingan BUMDes di Desa Sone memperlihatkan bahwa menghidupkan kembali sebuah lembaga usaha desa bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan menyediakan modal. Persoalan yang ditemukan sejak awal justru cukup mendasar, yaitu keterbatasan kemampuan pengelola, lemahnya administrasi dan pembukuan, serta belum kuatnya keterlibatan masyarakat. Kondisi ini membuat BUMDes yang sebelumnya pernah berjalan harus berhenti beroperasi. Karena itu, proses pendampingan diarahkan tidak hanya untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha, tetapi juga untuk membangun kemampuan pengurus dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.

Temuan tersebut sejalan dengan Ababil et al., yang menjelaskan bahwa keberadaan BUMDes dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa, tetapi manfaat tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan BUMDes dalam menjalankan kegiatan usahanya (Ababil and Yulistiyono 2022). Artinya, keberadaan BUMDes secara kelembagaan belum cukup. BUMDes harus dikelola dengan baik agar potensi ekonomi yang ada di desa benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks Desa Sone, kebutuhan untuk memperbaiki kemampuan pengelola menjadi semakin penting karena BUMDes sebelumnya mengalami masa tidak aktif akibat lemahnya pengelolaan.

Tahap persiapan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan FGD memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai persoalan yang dihadapi mitra. Proses ini juga membantu tim pengabdian kepada masyarakat dan masyarakat menentukan arah pengembangan BUMDes berdasarkan potensi yang memang tersedia di desa. Potensi pertanian, tenun ikat, dan perdagangan kecil menjadi dasar dalam menentukan unit usaha yang dianggap paling memungkinkan untuk dikembangkan. Pendekatan seperti ini penting karena pengembangan BUMDes sebaiknya tidak dilakukan dengan memaksakan jenis usaha tertentu, tetapi berangkat dari kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu perubahan yang cukup penting terlihat pada kemampuan pengurus dalam mengelola administrasi dan keuangan. Sebelum pendampingan, ketiadaan pembukuan menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan pengelolaan BUMDes tidak berjalan dengan baik. Melalui pelatihan dan praktik pencatatan kas harian, pengurus mulai memahami bagaimana pemasukan dan pengeluaran usaha harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Lebih dari 80% peserta menyatakan memahami konsep manajemen usaha desa, sementara pengurus telah mampu melakukan pencatatan keuangan secara mandiri. Perubahan ini penting karena

pencatatan keuangan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi dasar bagi pengurus untuk mengetahui kondisi usaha dan mengambil keputusan secara lebih rasional.

Temuan tersebut sejalan dengan Novia et al., yang menunjukkan bahwa kompetensi pengelola memiliki hubungan dengan kualitas pengelolaan keuangan BUMDes. Pengelola yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan lebih mampu menjalankan fungsi administrasi dan keuangan secara bertanggung jawab (Novia and Sujana 2021). Dalam pengalaman Desa Sone, peningkatan kemampuan tersebut mulai terlihat ketika pengurus tidak hanya menerima penjelasan mengenai pembukuan, tetapi langsung mencoba melakukan pencatatan berdasarkan situasi usaha yang mereka hadapi.

Penyusunan business plan dan SOP juga memberikan perubahan pada cara pengurus melihat BUMDes. Sebelumnya, kegiatan usaha belum memiliki arah pengelolaan yang cukup jelas. Melalui pendampingan, pengurus mulai menyusun rencana mengenai usaha yang akan dikembangkan dan prosedur yang perlu dilakukan dalam menjalankan kegiatan tersebut. Business plan membantu pengurus melihat BUMDes sebagai sebuah organisasi usaha yang membutuhkan perencanaan, sedangkan SOP memberikan pedoman agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih teratur. Hal ini menjadi penting karena keberlanjutan BUMDes tidak seharusnya bergantung pada satu atau dua orang pengurus saja.

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Yadi et al., bahwa pengembangan BUMDes perlu didukung oleh perencanaan usaha yang jelas dan terukur agar mampu menjadi bagian dari penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa (Yadi and Rifani n.d. 2025). Dengan demikian, penyusunan business plan di Desa Sone bukan hanya merupakan luaran administratif dari kegiatan pengabdian, tetapi menjadi langkah awal untuk membantu pengurus menentukan arah usaha dan mempertimbangkan peluang serta risiko yang mungkin dihadapi.

Pemilihan tenun ikat dan toko sembako sebagai unit usaha juga menunjukkan upaya untuk mengembangkan BUMDes berdasarkan realitas kehidupan masyarakat. Tenun ikat memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai budaya, sedangkan toko sembako berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pemilihan usaha yang dekat dengan kehidupan masyarakat dapat menjadi kekuatan karena BUMDes memiliki pasar yang lebih mudah dikenali. Namun, dalam jangka panjang, keberlanjutan kedua unit usaha tersebut tetap membutuhkan pengelolaan yang baik, pengembangan pemasaran, pengendalian keuangan, serta kemampuan membaca perubahan kebutuhan masyarakat.

Aspek pemasaran juga menjadi perhatian dalam kegiatan pendampingan. Peserta diperkenalkan pada penggunaan media sosial sebagai salah satu sarana promosi produk lokal. Bagi usaha seperti tenun ikat, pemasaran melalui media digital dapat membuka peluang untuk

memperkenalkan produk tidak hanya kepada masyarakat sekitar, tetapi juga kepada konsumen di luar desa. Meskipun demikian, penggunaan media sosial perlu diikuti dengan peningkatan kualitas produk, informasi produk yang jelas, pengemasan yang baik, serta konsistensi dalam pelayanan agar promosi benar-benar dapat memberikan dampak terhadap penjualan.

Selain kemampuan pengurus, keberhasilan BUMDes juga sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pengelola dengan masyarakat. Pada tahap awal, masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara utuh fungsi dan manfaat BUMDes. Kondisi tersebut membuat partisipasi masyarakat belum optimal. Melalui proses sosialisasi, diskusi, dan pelibatan dalam kegiatan, mulai muncul kembali ketertarikan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa membangun BUMDes juga berarti membangun rasa memiliki masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Dalam konteks ini, pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* menjadi relevan. Pendekatan ini memberikan ruang kepada masyarakat dan pengurus untuk ikut mengenali persoalan, membicarakan kebutuhan, mencoba solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Proses tersebut membuat pendampingan tidak terasa sebagai kegiatan yang sepenuhnya datang dari luar, tetapi menjadi proses belajar bersama. Bagi Desa Sone, pola seperti ini penting karena keberlanjutan BUMDes pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan pengurus untuk melanjutkan kegiatan setelah pendampingan selesai.

Dukungan Pemerintah Desa Sone melalui komitmen penyertaan modal sebesar Rp120 juta juga menunjukkan adanya perhatian yang kuat terhadap keberlanjutan BUMDes. Dukungan tersebut terdiri atas anggaran awal sebesar Rp70 juta dan tambahan Rp50 juta yang bersumber dari Dana Desa. Modal tersebut menjadi peluang bagi BUMDes untuk menjalankan kembali unit usahanya. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa modal saja tidak cukup. Modal harus disertai dengan perencanaan usaha, pencatatan keuangan, pembagian tugas, dan pengawasan yang baik agar dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.

Hal ini menjadi penting karena salah satu risiko dalam pengembangan BUMDes adalah ketika tambahan modal tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelola. Dalam kondisi demikian, modal justru berpotensi tidak memberikan hasil yang optimal. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah desa perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas pengurus dan keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini, penyusunan SOP, business plan, dan pembukuan sederhana yang dilakukan selama pendampingan dapat menjadi dasar untuk menjaga agar penggunaan modal lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi kelembagaan, terbentuknya kembali struktur kepengurusan BUMDes dengan pembagian tugas yang lebih jelas juga merupakan perkembangan penting. Struktur organisasi memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tertentu. Namun, struktur tersebut perlu diikuti dengan komunikasi yang baik, evaluasi rutin, dan kesediaan setiap pengurus untuk menjalankan tanggung jawabnya. Kurnianto dan Iswanu (2021) menunjukkan bahwa tata kelola BUMDes berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kerja sama, dan keberlanjutan. Dengan demikian, profesionalitas BUMDes tidak hanya dilihat dari terbentuknya struktur organisasi, tetapi juga dari bagaimana struktur tersebut bekerja dalam praktik.

Secara keseluruhan, hasil pendampingan di Desa Sone menunjukkan bahwa reaktivasi BUMDes membutuhkan perubahan pada beberapa aspek secara bersamaan. Penguatan kapasitas pengurus memberikan dasar bagi pengelolaan usaha, pembukuan membantu menciptakan transparansi, business plan memberikan arah pengembangan, sedangkan partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah desa menjadi kekuatan untuk menjaga keberlanjutan. Dengan kata lain, BUMDes akan lebih mudah berkembang ketika aspek manusia, kelembagaan, usaha, dan dukungan sosial berjalan secara bersama-sama.

Meskipun demikian, capaian kegiatan ini masih merupakan tahap awal. BUMDes yang telah kembali aktif perlu terus didampingi dan dievaluasi agar kegiatan usaha tidak kembali berhenti seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Pengurus perlu menjaga konsistensi pencatatan keuangan, meningkatkan pemasaran, mengembangkan kualitas produk, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap unit usaha. Pemerintah desa juga perlu memastikan bahwa dukungan modal disertai dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Dengan demikian, pengalaman Desa Sone memberikan pelajaran bahwa pendampingan BUMDes akan lebih bermakna apabila tidak berhenti pada pelatihan. Perubahan yang lebih penting justru terlihat ketika pengetahuan mulai diterapkan dalam kegiatan nyata, ketika pengurus mulai mampu mengelola keuangan, ketika unit usaha kembali berjalan, dan ketika masyarakat mulai melihat BUMDes sebagai bagian dari kehidupan ekonomi mereka. Proses tersebut menjadi fondasi awal untuk membangun BUMDes yang lebih mandiri, transparan, dan berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sone.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan BUMDes di Desa Sone menunjukkan bahwa menghidupkan kembali BUMDes membutuhkan lebih dari sekadar modal. Kemampuan pengurus, tata kelola

usaha, administrasi keuangan, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Melalui sosialisasi, pelatihan, praktik, dan pendampingan secara langsung, pengurus mulai memiliki pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola BUMDes.

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) membantu menciptakan proses pendampingan yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Pengurus dan masyarakat tidak hanya menerima materi, tetapi ikut membicarakan persoalan yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama. Hasilnya, BUMDes yang sebelumnya tidak aktif dapat kembali berjalan, kepengurusan terbentuk, dan beberapa perangkat pengelolaan seperti business plan, SOP, serta pencatatan keuangan sederhana mulai diterapkan. Unit usaha tenun ikat dan toko sembako juga mulai dikembangkan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Sone.

Dukungan Pemerintah Desa melalui komitmen penyertaan modal sebesar Rp120 juta menjadi tambahan kekuatan bagi BUMDes untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Namun, modal tersebut perlu dikelola secara hati-hati dan disertai dengan tata kelola yang transparan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga keterlibatan masyarakat dan memastikan pengurus terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha.

Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan dan semangat bersama dalam mengembangkan BUMDes Desa Sone. Ke depan, keberlanjutan BUMDes akan sangat bergantung pada konsistensi pengurus dalam mengelola usaha, dukungan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat. Jika ketiga unsur tersebut dapat berjalan bersama, BUMDes memiliki peluang untuk berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sone, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, atas dukungan dan keterbukaan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengurus BUMDes dan masyarakat Desa Sone yang telah meluangkan waktu, mengikuti setiap tahapan kegiatan, serta berbagi pengalaman dan gagasan selama proses pendampingan, dan juga terima kasih kepada Universitas Timor dan seluruh anggota tim pengabdian yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama sejak tahap persiapan hingga evaluasi kegiatan. Keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari keterlibatan dan kerja sama

berbagai pihak. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam proses menghidupkan kembali BUMDes dan membangun semangat bersama untuk mengembangkan potensi ekonomi Desa Sone secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ababil, Anas Arif, and Herry Yulistiyono. 2022. "Peran BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Kehi sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa." *Jurnal Ilmiah Aset* 24(2):97–112. doi:10.37470/1.24.2.204.
- Afandi, Agus, Dhea Leonita Arinda, Achmad Zaini, and Sjafiatul Mardiyah. 2024. "Pendekatan Participatory Action Research: Mengurai Jerat Kemiskinan untuk Pemberdayaan Komunitas Janda di Perdesaan." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 5(2):567–99. doi:10.37680/amalee.v5i2.5443.
- Ahmad Syaickhu and Purwanto Purwanto. 2025. "Pendampingan Pengembangan Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung." *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2(4):191–202. doi:10.62951/karyanyata.v2i4.2583.
- Azhari, Azhari, Moh . Mustofa, Erika Dwi Meisari, and Erika Tri Setia Anggarista. 2023. "Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualitas Sumber Daya Manusia; BUMDes; Strategi Pengembangan Usaha." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 14(2):82–92. doi:10.36982/jiegm.v14i2.3392.
- Ginting, Simson, Wiro Oktavius Ginting, and Nur Afifah. 2024. "Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Penguatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buluhnaman Kecamatan Munte Kabupaten Karo." *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 6(2):204–15. doi:10.24036/abdi.v6i2.680.
- Hastutik, Dwi, Dwiningtyas Padmaningrum, and Agung Wibowo. 2021. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten." *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension* 45(1):46. doi:10.20961/agritexts.v45i1.51539.
- K. Bidin, Cici Rianty, Syahrir Natsir, Harnida Wahyuni Adda, Niluh Putu Evvy Rossanty, and Ira Nuriya Santi. 2024. "Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Pemasaran Berbasis Digital Dipesisir Pantai Desa Masaingi." *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 3(2):207–13. doi:10.56303/jppmi.v3i2.298.
- Mayora Mayora, Ahmad Suja'i Tanjung, Anita Khairani Siregar, Rehulina Rehulina, Arini Alfa Hidayah, and Rofiil Harahap. 2024. "Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa untuk Mendorong Perekonomian di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 3(1):177–85. doi:10.30640/trending.v3i1.3664.
- Novia, Oky, and Edy Sujana. 2021. "Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sawan." *Jurnal Akuntansi Profesi* 12(2):341. doi:10.23887/jap.v12i2.35780.
- Rahmaini, Putri. n.d. 2025. "Optimizing Village Funds Through BUMDes Managerial Model in the Local Trade Sector."

Yadi, Muhammad, and Jamil Rifani. n.d. 2025. "MANAGEMENT STRATEGIES FOR VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MAMAR VILLAGE, AMUNTAI SELATAN SUB-DISTRICT, HULU SUNGAI UTARA REGENCY."